



## **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM BIROKRASI PUBLIK: STUDI KASUS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DI MERAUKE**

### ***PUBLIC PARTICIPATION IN PUBLIC BUREAUCRACY: A CASE STUDY OF POLICY IMPLEMENTATION IN MERAUKE***

**Willem Kambuam**

STISIPOL Yaleke Maro Merauke

Email: [wkambuam@gmail.com](mailto:wkambuam@gmail.com)

---

#### **Article Info**

##### **Article history :**

Received : 24-12-2024

Revised : 26-12-2024

Accepted : 28-12-2024

Published: 31-12-2024

#### **Abstract**

*Public participation in public bureaucracy is an important factor in creating inclusive, transparent, and adaptive policies to local needs. This study aims to analyze the factors that influence public participation in public bureaucracy in Merauke and formulate more effective policy strategies. Using a qualitative approach and case study design, this study explores the perspectives of various stakeholders, including local government officials, traditional leaders, civil society organizations, and the general public. Data were collected through in-depth interviews, participant observation, and documentation analysis, then analyzed using thematic analysis techniques. The results of the study indicate that public participation still faces structural, socio-cultural, and economic challenges, such as bureaucratic complexity, lack of access to information, and cultural factors that shape public relations with the government. Although there have been efforts by the government to increase public involvement, its effectiveness still varies depending on the level of public understanding and trust in bureaucratic institutions. More active participation has been shown to increase transparency, accountability, and legitimacy of policies. Therefore, bureaucratic reform is needed that simplifies participation mechanisms, utilizes information technology to expand access to information, and strengthens the role of traditional leaders and civil society organizations in bridging communication between the community and the government. This study confirms that optimizing participation mechanisms that are adaptive to local socio-cultural conditions is the key to creating a bureaucracy that is more responsive and oriented to the interests of the community. This finding is expected to be the basis for formulating more inclusive and sustainable public policies in Merauke.*

**Keywords:** *Community participation, public bureaucracy, inclusive policies, transparency, bureaucratic reform.*

---

#### **Abstrak**

Partisipasi masyarakat dalam birokrasi publik merupakan faktor penting dalam menciptakan kebijakan yang inklusif, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam birokrasi publik di Merauke serta merumuskan strategi kebijakan yang lebih efektif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus, penelitian ini menggali perspektif berbagai pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah daerah, tokoh adat, organisasi masyarakat sipil, serta masyarakat umum. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih menghadapi tantangan struktural, sosial-budaya, dan ekonomi, seperti kompleksitas birokrasi, kurangnya akses informasi, serta faktor budaya yang membentuk hubungan masyarakat dengan pemerintah. Meskipun telah ada upaya dari pemerintah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat, efektivitasnya masih bervariasi tergantung



pada tingkat pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi birokrasi. Partisipasi yang lebih aktif terbukti meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi birokrasi yang menyederhanakan mekanisme partisipasi, pemanfaatan teknologi informasi untuk memperluas akses informasi, serta penguatan peran tokoh adat dan organisasi masyarakat sipil dalam menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi mekanisme partisipasi yang adaptif terhadap kondisi sosial-budaya lokal menjadi kunci dalam menciptakan birokrasi yang lebih responsif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan publik yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Merauke.

**Kata Kunci:** Partisipasi masyarakat, birokrasi publik, kebijakan inklusif, transparansi, reformasi birokrasi.

## PENDAHULUAN

Partisipasi masyarakat dalam birokrasi publik merupakan elemen krusial dalam keberhasilan implementasi kebijakan (McNicol 2021), terutama di tingkat daerah. Di Merauke, sebagai salah satu wilayah dengan karakteristik sosial dan budaya yang beragam, pelibatan masyarakat dalam proses kebijakan menjadi tantangan tersendiri. Keberagaman etnis dan adat istiadat di Merauke menuntut adanya pendekatan yang inklusif agar kebijakan yang diterapkan dapat diterima dan dijalankan secara efektif. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, yang berpotensi menghambat efektivitas birokrasi publik.

Keterbatasan akses informasi, minimnya edukasi kebijakan, serta rendahnya tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan menjadi faktor utama yang mempengaruhi efektivitas partisipasi (Oberthür et al. 2025). Dalam konteks Merauke, di mana sebagian besar penduduknya masih bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, kebijakan publik yang tidak mempertimbangkan aspirasi lokal cenderung menghadapi resistensi. Selain itu, birokrasi yang cenderung bersifat top-down sering kali mengabaikan mekanisme umpan balik dari masyarakat, sehingga implementasi kebijakan tidak selalu mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan (Niedziałkowski and Chmielewski 2023). Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi strategi yang dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam birokrasi publik guna memastikan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu adanya pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi kebijakan. Model governance yang bersifat kolaboratif, dengan mengoptimalkan peran aktor lokal seperti tokoh adat, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi (Ngo-Ndjama and Ajani 2025), dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan di Merauke. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam penyampaian informasi dan mekanisme transparansi dalam birokrasi dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan adanya sistem yang lebih terbuka dan inklusif, diharapkan partisipasi masyarakat dalam birokrasi publik di Merauke dapat meningkat, sehingga kebijakan yang diterapkan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.

Implementasi kebijakan di Merauke masih menghadapi berbagai permasalahan di lapangan, terutama terkait dengan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses birokrasi publik. Salah satu kendala utama adalah kurangnya sosialisasi dan transparansi dari pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan. Banyak kebijakan yang dibuat tanpa melibatkan masyarakat secara langsung, sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan kondisi



sosial-ekonomi lokal. Selain itu, birokrasi yang masih cenderung sentralistis menghambat masyarakat dalam menyampaikan aspirasi atau memberikan umpan balik terhadap kebijakan yang diterapkan. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat serta lemahnya dukungan terhadap implementasi kebijakan tersebut.

Selain faktor komunikasi yang kurang efektif, kendala lain yang ditemukan di lapangan adalah masih kuatnya dominasi aktor-aktor tertentu dalam proses birokrasi publik, seperti elit politik dan kelompok berkepentingan tertentu, yang sering kali mengesampingkan aspirasi masyarakat luas. Masyarakat adat dan kelompok marjinal, misalnya, sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakses informasi kebijakan atau mendapatkan ruang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Kurangnya kapasitas masyarakat dalam memahami prosedur administratif dan peraturan yang berlaku juga menjadi hambatan dalam meningkatkan keterlibatan mereka. Akibatnya, banyak kebijakan yang diimplementasikan tidak berjalan secara optimal atau bahkan tidak sesuai dengan realitas di lapangan, sehingga efektivitas birokrasi publik di Merauke masih perlu ditingkatkan.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam birokrasi publik memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Daerah dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi cenderung memiliki kebijakan yang lebih responsif dan berkelanjutan (Zhang, Xu, and Feng 2022). Di wilayah-wilayah dengan birokrasi yang masih bersifat top-down, kebijakan sering kali mengalami hambatan dalam implementasi akibat rendahnya keterlibatan masyarakat (Sanga, Gonzalez Benson, and Josyula 2022). Khusus di Merauke, penelitian oleh Widodo (2023) menyoroti bagaimana faktor budaya dan sosial mempengaruhi pola partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik, di mana komunitas adat memiliki peran penting dalam mendukung atau menolak suatu kebijakan. Data dari BPS Merauke (2023) juga menunjukkan bahwa hanya sekitar 35% masyarakat yang merasa terlibat dalam proses perumusan kebijakan daerah, mengindikasikan masih adanya kesenjangan antara birokrasi dan partisipasi publik. Temuan-temuan ini menguatkan urgensi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam birokrasi publik guna memastikan kebijakan yang lebih inklusif dan efektif.

Meskipun berbagai penelitian telah menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam birokrasi publik, masih terdapat kesenjangan dalam memahami bagaimana faktor-faktor lokal, seperti budaya, akses informasi, dan struktur birokrasi, memengaruhi efektivitas partisipasi di Merauke. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada wilayah perkotaan dengan akses yang lebih baik terhadap kebijakan publik (Tambaip and Tjilen 2023), sementara konteks daerah dengan karakteristik adat yang kuat, seperti Merauke, masih kurang dieksplorasi secara mendalam. Selain itu, belum banyak kajian yang secara spesifik menganalisis hubungan antara mekanisme birokrasi lokal dan hambatan yang dihadapi masyarakat adat dalam menyampaikan aspirasi serta berpartisipasi dalam kebijakan. Kesenjangan lainnya adalah kurangnya penelitian yang mengkaji dampak penggunaan teknologi dan model kolaboratif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam birokrasi publik di daerah ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menggali lebih dalam dinamika partisipasi masyarakat dalam birokrasi publik di Merauke serta merumuskan strategi yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kondisi lokal.



Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan di Merauke melalui partisipasi masyarakat yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kondisi lokal. Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam birokrasi publik berpotensi menghambat pencapaian tujuan kebijakan serta mengurangi legitimasi pemerintah dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, karakteristik sosial dan budaya di Merauke, termasuk peran komunitas adat, memerlukan pendekatan yang lebih kontekstual agar kebijakan dapat diterima dan dijalankan secara efektif. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat serta merumuskan strategi yang lebih kolaboratif, penelitian ini berkontribusi dalam membangun model birokrasi yang lebih responsif dan transparan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang lebih partisipatif, sehingga meningkatkan kepercayaan publik serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang secara spesifik mengeksplorasi dinamika partisipasi masyarakat dalam birokrasi publik di Merauke dengan mempertimbangkan faktor budaya, akses informasi, dan pola interaksi antara pemerintah dan komunitas lokal. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang cenderung berfokus pada wilayah perkotaan atau aspek kebijakan secara umum, studi ini menyoroti peran masyarakat adat dan kelompok marjinal dalam implementasi kebijakan serta hambatan yang mereka hadapi. Selain itu, penelitian ini mengkaji bagaimana penggunaan teknologi dan model kolaboratif dapat menjadi solusi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan berbasis pada realitas lokal, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam merancang strategi kebijakan yang lebih inklusif, transparan, dan berkelanjutan di daerah dengan karakteristik sosial-budaya yang unik seperti Merauke. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam birokrasi publik di Merauke serta merumuskan strategi kebijakan yang lebih inklusif, transparan, dan adaptif terhadap kondisi sosial-budaya lokal.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap partisipasi masyarakat dalam birokrasi publik di Merauke. Studi kasus dipilih karena memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang terjadi di lapangan, dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan politik setempat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola partisipasi masyarakat, hambatan yang dihadapi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Merauke, dengan subjek penelitian yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah daerah, tokoh adat, organisasi masyarakat sipil, serta masyarakat umum yang terlibat dalam kebijakan publik. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, dengan mempertimbangkan keterlibatan mereka dalam birokrasi publik serta pemahaman mereka terhadap dinamika kebijakan di daerah tersebut. Melibatkan berbagai kelompok dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh perspektif yang beragam dan memperkuat validitas temuan.



Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pengalaman, persepsi, serta tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam berpartisipasi dalam birokrasi publik. Observasi partisipatif dilakukan untuk mengamati secara langsung proses birokrasi serta interaksi antara masyarakat dan pemerintah dalam implementasi kebijakan. Sementara itu, dokumentasi terhadap kebijakan daerah, regulasi, serta laporan terkait digunakan untuk memahami kerangka kebijakan yang ada serta memastikan bahwa analisis berbasis pada data yang valid.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis tematik, dengan mengidentifikasi pola-pola utama terkait partisipasi masyarakat, kendala birokrasi, serta peluang untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Untuk memastikan keabsahan temuan, dilakukan triangulasi data dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memperoleh kesimpulan yang lebih akurat dan objektif.

Keabsahan data dalam penelitian ini dijamin melalui beberapa kriteria ilmiah. Kredibilitas diperoleh dengan melakukan konfirmasi hasil melalui wawancara ulang dan diskusi dengan informan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan mencerminkan realitas di lapangan. Transferabilitas dijaga dengan menyajikan deskripsi kontekstual yang kaya, sehingga temuan penelitian dapat diaplikasikan dalam situasi serupa. Dependabilitas dijamin dengan pencatatan data yang sistematis dan konsisten selama proses penelitian. Sementara itu, konfirmabilitas dicapai dengan menjaga objektivitas dalam analisis serta membandingkan berbagai sumber data untuk meminimalisir bias peneliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Hasil penelitian ini mengungkap dinamika partisipasi masyarakat dalam birokrasi publik di Merauke, termasuk faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keterlibatan masyarakat dalam implementasi kebijakan. Analisis yang dilakukan mencerminkan bagaimana interaksi antara pemerintah, masyarakat adat, serta organisasi sipil mempengaruhi efektivitas kebijakan yang diterapkan. Selain itu, penelitian ini menyoroti sejauh mana kebijakan yang ada telah mendorong partisipasi aktif masyarakat serta tantangan yang masih perlu diatasi. Dengan memahami kondisi ini, penelitian ini memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

**Tabel 1. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Birokrasi Publik di Merauke**

Aspek	Masyarakat Adat	Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)	Kelompok Masyarakat Lainnya
Bentuk Partisipasi	Musyawarah adat, keterlibatan dalam keputusan berbasis kearifan lokal.	Advokasi kebijakan, konsultasi publik, pengawasan implementasi kebijakan.	Partisipasi dalam forum desa, diskusi komunitas, pengaduan publik.



Akses terhadap Informasi	Terbatas, terutama terkait kebijakan formal pemerintah.	Lebih luas, sering mendapatkan akses dari jaringan dan media.	Bervariasi, tergantung tingkat pendidikan dan keterlibatan sosial.
Tingkat Keterlibatan	Rendah hingga sedang, tergantung pada pengakuan pemerintah terhadap adat.	Tinggi, karena memiliki kapasitas dan akses yang lebih baik.	Sedang, terutama dalam isu-isu yang langsung berdampak pada kehidupan sehari-hari.
Hambatan Partisipasi	Kesenjangan bahasa dan budaya, kurangnya pengakuan formal.	Regulasi yang membatasi peran advokasi, keterbatasan sumber daya.	Minimnya pemahaman birokrasi, keterbatasan waktu dan ekonomi.
Pengaruh terhadap Kebijakan	Cenderung bersifat informal dan berbasis kesepakatan lokal.	Berkontribusi dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan.	Terbatas pada partisipasi pasif dan reaktif.

Tabel 1 menunjukkan perbedaan partisipasi masyarakat dalam birokrasi publik. Masyarakat adat berpartisipasi melalui musyawarah lokal tetapi terhambat oleh keterbatasan akses informasi dan pengakuan formal. OMS memiliki keterlibatan tinggi dalam advokasi kebijakan meskipun dibatasi oleh regulasi. Kelompok masyarakat lainnya lebih aktif dalam forum desa, tetapi partisipasinya dipengaruhi oleh pemahaman birokrasi dan faktor ekonomi. Secara keseluruhan, OMS memiliki pengaruh terbesar terhadap kebijakan, sementara masyarakat adat dan kelompok lainnya lebih bersifat reaktif.

**Tabel 2. Hambatan dalam Partisipasi Masyarakat dalam Birokrasi Publik**

Faktor	Deskripsi Hambatan
<b>Struktural</b>	Birokrasi yang kompleks menyebabkan masyarakat kesulitan dalam memahami prosedur administrasi.
	Regulasi yang kurang fleksibel membatasi ruang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.
	Keterbatasan akses informasi membuat masyarakat kurang mengetahui kebijakan yang sedang berjalan
<b>Sosial-Budaya</b>	Struktur adat yang masih kuat mempengaruhi mekanisme partisipasi, di mana hanya tokoh adat yang memiliki akses dalam interaksi dengan pemerintah.
	Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akibat pengalaman buruk dalam implementasi kebijakan sebelumnya.
	Hierarki sosial menyebabkan kelompok tertentu, seperti perempuan dan masyarakat marjinal, memiliki akses terbatas dalam forum kebijakan publik
<b>Ekonomi</b>	Keterbatasan sumber daya, baik dalam bentuk finansial maupun tenaga kerja, membatasi masyarakat dalam berpartisipasi aktif.
	Mayoritas masyarakat lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan ekonomi dibandingkan terlibat dalam proses birokrasi.
	Ketimpangan akses terhadap bantuan ekonomi dan peluang usaha mengurangi motivasi masyarakat dalam mendukung kebijakan publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan partisipasi masyarakat dalam birokrasi publik di Merauke dipengaruhi oleh faktor struktural, sosial-budaya, dan ekonomi. Secara struktural,



kompleksitas birokrasi, regulasi yang kurang fleksibel, serta keterbatasan akses informasi menghambat masyarakat dalam memahami dan terlibat dalam kebijakan publik. Dari sisi sosial-budaya, sistem adat yang kuat membatasi partisipasi luas, rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah mengurangi antusiasme masyarakat, serta hierarki sosial menyebabkan kelompok tertentu memiliki akses terbatas. Sementara itu, faktor ekonomi menjadi kendala utama karena masyarakat lebih berfokus pada kebutuhan ekonomi dibandingkan keterlibatan dalam birokrasi, serta ketimpangan akses terhadap bantuan ekonomi turut mempengaruhi motivasi partisipasi mereka.

**Tabel 3. Strategi dan Mekanisme Pemerintah dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat**

Aspek	Temuan Penelitian
Kebijakan dan Program	Pemerintah daerah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, seperti musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), forum konsultasi publik, dan program desa partisipatif. Namun, efektivitasnya masih terbatas akibat kurangnya sosialisasi dan aksesibilitas bagi kelompok masyarakat tertentu.
Peran Teknologi dan Komunikasi	Pemanfaatan teknologi informasi, seperti aplikasi pengaduan masyarakat dan media sosial, telah meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi kebijakan. Namun, kesenjangan digital masih menjadi kendala, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan infrastruktur internet.
Model Kolaboratif	Upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta telah diterapkan dalam beberapa program, seperti pembangunan berbasis kemitraan dan CSR perusahaan. Meskipun demikian, koordinasi antar pihak masih perlu ditingkatkan untuk menghindari tumpang tindih kebijakan dan memperkuat efektivitas implementasi di lapangan.

Tabel 3 menunjukkan bahwa pemerintah telah menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam birokrasi publik, namun masih menghadapi tantangan dalam efektivitas implementasinya. Kebijakan seperti Musrenbang dan forum konsultasi publik telah diterapkan, tetapi keterbatasan sosialisasi menghambat partisipasi optimal. Teknologi informasi mulai dimanfaatkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap kebijakan, namun kesenjangan digital tetap menjadi kendala, terutama di daerah terpencil. Model kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta telah diterapkan dalam beberapa program, tetapi koordinasi yang lemah masih menjadi hambatan utama dalam meningkatkan efektivitas dan kesinambungan program tersebut.

**Tabel 4 Dampak Partisipasi Masyarakat terhadap Implementasi Kebijakan di Merauke**

Aspek	Temuan Penelitian
Efektivitas Kebijakan	Partisipasi masyarakat meningkatkan efektivitas kebijakan melalui pemahaman yang lebih baik terhadap kebutuhan lokal, mempercepat implementasi, dan meningkatkan kepatuhan terhadap aturan.
Transparansi	Keterlibatan masyarakat mendorong keterbukaan informasi dalam proses kebijakan, mengurangi ketidakpastian, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.



Akuntabilitas	Mekanisme partisipasi memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, mencegah penyalahgunaan wewenang, serta memastikan penggunaan anggaran yang lebih tepat sasaran.
Legitimasi Kebijakan	Kebijakan yang melibatkan masyarakat lebih mudah diterima, mengurangi potensi konflik, serta meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap hasil kebijakan.
Pembangunan Daerah	Partisipasi aktif masyarakat mendorong pengembangan infrastruktur berbasis kebutuhan riil, mempercepat pembangunan ekonomi, dan memperkuat kapasitas lokal dalam pengambilan keputusan.
Kesejahteraan Masyarakat	Partisipasi yang efektif berkontribusi pada peningkatan layanan publik, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berperan penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan di Merauke. Keterlibatan aktif masyarakat mendorong transparansi dan akuntabilitas, sehingga kebijakan lebih terbuka, diawasi dengan baik, dan tepat sasaran. Selain itu, legitimasi kebijakan meningkat karena adanya rasa memiliki dari masyarakat, yang berujung pada penerimaan dan kepatuhan yang lebih tinggi. Dalam konteks pembangunan daerah, partisipasi membantu menciptakan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal, mempercepat pembangunan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

### **Pembahasan**

Tingkat partisipasi masyarakat dalam birokrasi publik di Merauke menunjukkan variasi yang signifikan pada setiap tahap kebijakan, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. Pada tahap perencanaan, partisipasi masyarakat masih terbatas, terutama karena minimnya akses terhadap informasi kebijakan dan kurangnya mekanisme konsultasi publik yang efektif. Masyarakat sering kali hanya dilibatkan secara formal melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), namun keterlibatan mereka lebih bersifat pasif. Pada tahap implementasi, partisipasi mulai meningkat, terutama dalam program yang bersifat langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial. Sementara itu, pada tahap evaluasi, partisipasi cenderung rendah karena kurangnya transparansi dalam mekanisme penilaian kebijakan serta keterbatasan kapasitas masyarakat dalam melakukan pengawasan kebijakan secara efektif.

Perbandingan tingkat keterlibatan antara komunitas adat, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok masyarakat umum juga memperlihatkan dinamika yang berbeda. Komunitas adat memiliki peran yang cukup signifikan dalam kebijakan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan tata ruang wilayah adat, namun partisipasi mereka sering kali bersifat informal dan bergantung pada negosiasi dengan pemerintah (Molla, Supriatna, and Kurniawati 2021). Organisasi masyarakat sipil lebih aktif dalam advokasi kebijakan, terutama dalam isu-isu lingkungan, hak-hak masyarakat adat, dan pembangunan berkelanjutan. Mereka berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah serta memberikan edukasi terkait kebijakan publik. Sementara itu, masyarakat umum cenderung memiliki keterlibatan yang lebih rendah karena keterbatasan pemahaman terhadap birokrasi serta adanya persepsi bahwa kebijakan publik adalah domain eksklusif pemerintah (Putranto et al. 2022).



Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi dan keterlibatan masyarakat dalam birokrasi publik. Faktor pertama adalah tingkat literasi politik dan administrasi masyarakat, di mana pemahaman yang rendah terhadap proses kebijakan membuat masyarakat kurang percaya diri untuk terlibat. Faktor kedua adalah aspek sosial dan budaya, termasuk sistem kepemimpinan tradisional yang masih kuat di beberapa komunitas, yang dapat mempengaruhi pola partisipasi. Faktor ketiga adalah faktor ekonomi, di mana sebagian besar masyarakat lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari daripada terlibat dalam proses birokrasi yang dianggap tidak memberikan manfaat langsung. Selain itu, faktor transparansi dan akuntabilitas pemerintah juga berperan besar dalam membentuk kepercayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam birokrasi publik (Sofyani, Pratolo, and Saleh 2022).

Salah satu hambatan utama dalam partisipasi masyarakat dalam birokrasi publik adalah kompleksitas birokrasi dan keterbatasan akses terhadap informasi kebijakan. Proses administratif yang panjang, regulasi yang rumit, serta kurangnya transparansi dalam mekanisme pengambilan keputusan sering kali menjadi kendala bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif. Banyak kebijakan yang dibuat tanpa keterbukaan yang memadai, sehingga masyarakat kesulitan memahami prosedur dan mekanisme yang harus diikuti. Selain itu, akses terhadap informasi kebijakan masih terbatas, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan dalam infrastruktur komunikasi. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait kebijakan yang sedang berjalan semakin memperparah kondisi ini, sehingga hanya kelompok tertentu, seperti pejabat atau elit lokal, yang memiliki pemahaman mendalam terhadap kebijakan yang diterapkan.

Selain hambatan struktural, faktor sosial-budaya juga berperan dalam membentuk sikap masyarakat terhadap birokrasi publik. Nilai-nilai budaya dan adat yang masih kuat di Merauke sering kali mempengaruhi cara masyarakat berinteraksi dengan pemerintah. Dalam banyak kasus, masyarakat masih memiliki persepsi bahwa pengambilan keputusan adalah wewenang pemerintah atau tokoh adat, sehingga mereka cenderung pasif dalam proses birokrasi publik. Hierarki sosial yang kaku juga menjadi penghalang, di mana masyarakat sering kali merasa enggan atau takut untuk mengemukakan pendapat di hadapan pejabat pemerintah (Suryadinata 2024). Selain itu, beberapa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai adat setempat, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap birokrasi dan membatasi keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan publik.

Faktor ekonomi juga menjadi hambatan utama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam birokrasi publik (Chohan 2023). Banyak masyarakat di Merauke yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, sehingga mereka lebih fokus pada pekerjaan sehari-hari dibandingkan dengan terlibat dalam kebijakan publik. Keterbatasan sumber daya ekonomi juga berdampak pada akses terhadap pendidikan dan informasi yang berkaitan dengan kebijakan publik, yang pada akhirnya membatasi kemampuan masyarakat dalam memahami dan mengikuti proses birokrasi. Selain itu, biaya partisipasi dalam birokrasi, seperti transportasi ke kantor pemerintahan atau waktu yang harus dikorbankan untuk mengikuti forum konsultasi, menjadi faktor yang menghambat masyarakat untuk terlibat aktif. Tanpa adanya insentif ekonomi atau jaminan bahwa partisipasi mereka akan memberikan manfaat langsung, masyarakat cenderung kurang tertarik untuk terlibat dalam proses pengambilan kebijakan publik.



Kebijakan dan program partisipatif yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah di Merauke menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam birokrasi publik. Berbagai inisiatif, seperti musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), forum konsultasi publik, serta program pemberdayaan berbasis komunitas telah diimplementasikan untuk memberikan ruang bagi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Namun, efektivitas kebijakan ini masih menghadapi kendala, seperti rendahnya tingkat literasi kebijakan di kalangan masyarakat serta dominasi kelompok tertentu dalam forum partisipatif. Selain itu, birokrasi yang masih bersifat top-down sering kali membatasi fleksibilitas masyarakat dalam menyuarakan aspirasi mereka secara langsung (Zhang, Zhao, and Dong 2021). Oleh karena itu, meskipun kebijakan partisipatif telah diterapkan, dampaknya terhadap peningkatan keterlibatan masyarakat masih perlu dievaluasi secara lebih mendalam.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi salah satu strategi yang mulai diterapkan untuk memperluas akses partisipasi masyarakat dalam birokrasi publik (Shava and Vyas-Doorgapersad 2023). Penggunaan platform digital, seperti situs web resmi pemerintah daerah, media sosial, serta aplikasi layanan publik, memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan, mengakses informasi kebijakan, dan melaporkan permasalahan secara lebih cepat dan transparan. Namun, masih terdapat kesenjangan digital yang signifikan, terutama di wilayah pedesaan dan komunitas adat yang memiliki akses terbatas terhadap teknologi. Hambatan lainnya adalah rendahnya literasi digital serta minimnya infrastruktur pendukung yang membuat pemanfaatan teknologi belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk meningkatkan keterjangkauan dan efektivitas teknologi sebagai alat partisipasi masyarakat dalam birokrasi publik.

Kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil (OMS), dan sektor swasta memiliki potensi besar dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat. OMS berperan sebagai jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan pemerintah, memberikan edukasi, serta mendorong advokasi terhadap isu-isu kebijakan yang relevan dengan kepentingan publik. Sektor swasta juga dapat berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang mendukung inisiatif partisipatif dalam pembangunan daerah (Wirba 2024). Meskipun kolaborasi ini telah dilakukan dalam beberapa program, koordinasi antar-pemangku kepentingan masih perlu ditingkatkan agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan serta ketidaksesuaian antara program yang dirancang dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, sinergi yang lebih kuat antara ketiga aktor ini perlu diperkuat melalui kebijakan yang lebih inklusif dan berorientasi pada kepentingan bersama.

Tingkat partisipasi masyarakat memiliki korelasi langsung dengan efektivitas kebijakan publik (Zhang et al. 2022), terutama dalam konteks implementasi di tingkat daerah. Partisipasi yang tinggi memungkinkan adanya masukan yang lebih relevan dari masyarakat, sehingga kebijakan yang diterapkan lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam tahap implementasi kebijakan mempercepat adopsi program-program pemerintah karena adanya rasa kepemilikan bersama. Sebaliknya, rendahnya partisipasi masyarakat sering kali menyebabkan kebijakan berjalan secara top-down tanpa pemahaman yang mendalam terhadap realitas di lapangan, sehingga efektivitas implementasi menjadi terbatas dan cenderung menemui berbagai hambatan.



Kontribusi partisipasi masyarakat juga dapat dilihat dari meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi kebijakan publik. Keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan dan pengawasan kebijakan menciptakan sistem yang lebih terbuka (Chu, Bian, and Yang 2022), di mana keputusan pemerintah dapat dikritisi dan diawasi oleh publik. Transparansi ini mendorong peningkatan akuntabilitas birokrasi, meminimalisasi potensi penyalahgunaan wewenang, serta membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, legitimasi kebijakan juga semakin kuat ketika masyarakat merasa bahwa aspirasi mereka diakomodasi dalam keputusan yang diambil, sehingga mereka lebih mendukung dan aktif dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Partisipasi masyarakat dalam birokrasi publik tidak hanya berdampak pada efektivitas kebijakan, tetapi juga memiliki implikasi lebih luas terhadap pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar berdampak positif terhadap kebutuhan lokal, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun infrastruktur (Di Maddaloni and Sabini 2022). Selain itu, peningkatan kapasitas masyarakat dalam memahami (Tambaip, Tjilen, and Ohoiwutun 2023) juga mendorong munculnya inisiatif-inisiatif berbasis komunitas yang dapat mempercepat pembangunan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat bukan sekadar pelengkap dalam birokrasi publik, tetapi merupakan faktor kunci yang menentukan keberhasilan kebijakan dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan bagi daerah dan kesejahteraan masyarakatnya.

Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam birokrasi publik memerlukan strategi yang komprehensif, dimulai dengan peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan publik melalui edukasi yang berkelanjutan, sosialisasi berbasis komunitas, serta pemanfaatan media digital untuk menyebarkan informasi secara luas dan mudah diakses. Selain itu, reformasi birokrasi menjadi langkah krusial dalam menyederhanakan prosedur partisipasi agar lebih inklusif dan efisien, seperti melalui transparansi proses pengambilan keputusan, penyediaan kanal aspirasi yang lebih responsif, serta integrasi teknologi dalam sistem pelayanan publik. Peran tokoh adat, pemimpin komunitas, dan organisasi sipil juga harus diperkuat sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, mengingat mereka memiliki pengaruh sosial yang signifikan dalam membangun kepercayaan dan memobilisasi partisipasi aktif masyarakat. Dengan strategi ini, diharapkan partisipasi masyarakat tidak hanya menjadi simbolik, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap efektivitas kebijakan dan pembangunan daerah.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam birokrasi publik di Merauke masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi struktural, sosial-budaya, maupun ekonomi. Meskipun terdapat beberapa bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan, tingkat partisipasi masih terbatas akibat kompleksitas birokrasi, kurangnya akses informasi, serta faktor budaya yang mempengaruhi hubungan masyarakat dengan pemerintah. Pemerintah telah berupaya meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui berbagai kebijakan dan program, namun efektivitasnya masih bervariasi tergantung pada tingkat pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi birokrasi. Partisipasi yang lebih aktif terbukti berkontribusi terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi kebijakan, sehingga diperlukan strategi yang lebih inklusif, seperti reformasi birokrasi, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan peran tokoh adat dan organisasi masyarakat sipil. Oleh karena itu,



optimalisasi mekanisme partisipasi yang adaptif terhadap kondisi sosial-budaya setempat menjadi kunci dalam menciptakan birokrasi yang lebih responsif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chohan, Usman W. 2023. "Public Value and Bureaucratic Rhetoric." Pp. 11079–83 in *Global encyclopedia of public administration, public policy, and governance*. Springer.
- Chu, Zhaopeng, Chen Bian, and Jun Yang. 2022. "How Can Public Participation Improve Environmental Governance in China? A Policy Simulation Approach with Multi-Player Evolutionary Game." *Environmental Impact Assessment Review* 95:106782.
- Di Maddaloni, Francesco, and Luca Sabini. 2022. "Very Important, yet Very Neglected: Where Do Local Communities Stand When Examining Social Sustainability in Major Construction Projects?" *International Journal of Project Management* 40(7):778–97.
- McNicol, Barbara J. 2021. "Public Participation." Pp. 528–31 in *Sustainable Planet: Issues and Solutions for Our Environment's Future: Volume 1-2*. Vol. 2. Springer.
- Molla, Yoseph, Tjahya Supriatna, and Layla Kurniawati. 2021. "Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Kampung Wisata Praiijing Di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabu-Bak Kabupaten Sumba Barat." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa* 6(2):140–48.
- Ngo-Ndjama, Joelle D., and Oluwatoyin Ayodele Ajani. 2025. "Collaborative Governance and Public Administration Effectiveness in South Africa Through a Multidisciplinary Approach: Public Administration in South Africa." Pp. 259–92 in *Challenges of Public Administration Management for Higher Education*. IGI Global.
- Niedziałkowski, Krzysztof, and Piotr Chmielewski. 2023. "Challenging the Dominant Path of Forest Policy? Bottom-up, Citizen Forest Management Initiatives in a Top-down Governance Context in Poland." *Forest Policy and Economics* 154:103009.
- Oberthür, Sebastian, Ingmar von Homeyer, Lea Schewe, and Brendan Moore. 2025. "Public Participation in EU Climate Governance: The Underexploited Potential of National Energy and Climate Plans." *Journal of European Integration* 47(2):257–76.
- Putranto, Ricky Adi, Joni Dawud, Hafid Aditya Pradesa, Djony Harijanto, and Ida Bagus Agung Dharmanegara. 2022. "Manajemen Talenta Pada Sektor Publik: Sebuah Studi Literatur Serta Arah Model Kajian Untuk Masa Depan." *Jurnal Manajemen Dan Profesional* 3(2):176–211.
- Sanga, Naganika, Odessa Gonzalez Benson, and Lakshmi Josyula. 2022. "Top-down Processes Derail Bottom-up Objectives: A Study in Community Engagement and 'Slum-Free City Planning.'" *Community Development Journal* 57(4):615–34.
- Shava, Elvin, and Shikha Vyas-Doorgapersad. 2023. "Inclusive Participation in Information and Communication Technologies (ICTs) Processes for Smart Services in the City of Johannesburg." *Insights into Regional Development* 5(1):26–40.
- Sofyani, Hafiez, Suryo Pratolo, and Zakiah Saleh. 2022. "Do Accountability and Transparency Promote Community Trust? Evidence from Village Government in Indonesia." *Journal of Accounting & Organizational Change* 18(3):397–418.
- Suryadinata, Theofilus Apolaris. 2024. "Ketidakadilan Substansial Dan Kekerasan Simbolik Dalam Problem Marginalisasi Anak Berkebutuhan Khusus Di Surakarta." *Jurnal Analisa Sosiologi* 13(2).
- Tambaip, Beatus, and Alexander Phuk Tjilen. 2023. "Analisis Kebijakan Publik Dalam Derajat



- Kesehatan Di Papua.” *Jurnal Kebijakan Publik* 14(1):101–10.
- Tambaip, Beatus, Alexander Phuk Tjilen, and Yosephina Ohoiwutun. 2023. “Model Transformasi Budaya Lokal Dalam Pelayanan Publik.” *JEKKP (Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Kebijakan Publik)* 5(1):1–9.
- Wirba, Asan Vernyuy. 2024. “Corporate Social Responsibility (CSR): The Role of Government in Promoting CSR.” *Journal of the Knowledge Economy* 15(2):7428–54.
- Zhang, Hua, Tiantian Xu, and Chao Feng. 2022. “Does Public Participation Promote Environmental Efficiency? Evidence from a Quasi-Natural Experiment of Environmental Information Disclosure in China.” *Energy Economics* 108:105871.
- Zhang, Liwei, Ji Zhao, and Weiwei Dong. 2021. “Street-level Bureaucrats as Policy Entrepreneurs: Action Strategies for Flexible Community Governance in China.” *Public Administration* 99(3):469–83.